

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI

Sudarmi Ismail *)

Abstract : Era Gloalisasi represent an condition showing that this world have progressively minimize. We will not again can hide the kobobrokan or wretchedness from an state. That matter is possibility happened by the blessing of progress of technique informatika, where in the world of education expected by an policy from government which can follow the globalization era.

Keywords : Education Policy, globalization.

Konsep pasar persaingan sempurna merupakan suatu kondisi dimana yang memungkinkan seluruh pemain dalam suatu pasar persaingan bebas dapat keluar dan masuk pasar sesuai dengan pertimbangan rasionalnya masing-masing. Pada pasar tersebut produk yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa. Dalam era pasar bebas tersebut ikatan teritorial kewilayahan sebuah negara menjadi demikian longgar, terutama negara-negara yang terikat dengan perjanjian multilateral dengan negara lain, baik dalam kawasan maupun antar kawasan. Konsep inilah yang kemudian dimaknai sebagai era globalisasi

Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup ekonomi, budaya, politik, atau aspek sosial sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut bersaing di setiap negara peserta. Persaingan bebas seperti ini menuntut kesiapan setiap negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkut dan keluar dari arena persaingan.

Dalam kondisi yang demikian itu, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh sebuah negara yaitu melaksanakan atau mereformasi sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem produksi, atau sistem pembinaan sumber daya manusianya yang sesuai dengan tuntutan era pasar bebas. Jika negara tersebut tidak mengindahkan hal itu, produk barang atau jasanya tidak memiliki daya saing yang memadai. Dengan demikian, para investor dan atau para *buyer* tersebut tidak akan

pernah berkehendak untuk tertarik dengan produk barang atau jasa negara tersebut.

Uraian yang tertuju pada kecenderungan global yang didasari oleh tinjauan ekonomi di atas, hanya akan meletakkan kita pada suatu kondisi bahwa kita belum banyak melakukan perubahan dalam menghadapi era persaingan bebas atau era globalisasi tersebut. Baik dalam mutu atau kualitas produk, maupun mutu sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia Indonesia, berdasarkan hasil survei lembaga internasional UNDP, termasuk dalam urutan ke 102 dari 170-an negara didunia.

Era globalisasi juga merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Kita akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau keadaan yang buruk dari suatu negara, dalam waktu singkat kita akan diketahui oleh bangsa-bangsa lain didunia.

Globalisasi ini memungkinkan menjadi sebuah proses interaktif yang mengembangkan suatu kebudayaan dunia yang sama sehingga akan memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal. Dengan demikian, kemajuan dan keterbelakangan suatu negara dibandingkan dengan negara lain demikian jelas. Hal ini, berimplikasi pada implementasi proses-proses global, seperti proses humanisasi dan proses demokratisasi. Disamping itu, hal ini akan mengarah pada proses kehidupan urban, serta kebudayaan yang sama dimana saja atau munculnya ide-ide teknologi yang umum. Indonesia, sebagai bagian dari proses global, harus dapat

menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tuntutan tersebut.

Mencermati latar belakang tersebut, sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia, perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan global tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba melihat lebih jauh tentang konsep globalisasi dan kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan SDM Indonesia. Disamping itu perlu pula ditinjau lebih lanjut tentang berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sehubungan dengan peningkatan SDM tersebut.

Penomena Sekolah Internasional

Dalam bidang pendidikan, khususnya yang dipersiapkan dalam menghadapi pasar bebas, belum terlihat transparan gerakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidang ini, termasuk pemerintah sendiri. Harus kita akui bahwa memang dalam empat tahun terakhir kita melihat terdapat beberapa investor asing yang mencoba bergerak dibidang pendidikan yaitu dengan mendirikan beberapa sekolah-sekolah internasional diluar yang telah pernah didirikan oleh perwakilan bersama selama ini.

Sekolah internasional yang didirikan oleh kedutaan besar India dengan *Gandhi Memorial School*, kedutaan besar Amerika dengan *Jakarta Internasional School*, Australia dal lain-lain. Sejak reformasi digulirkan, beberapa penanam modal dalam negeri mencoba mendirikan sekolah-sekolah sejenis, seperti sekolah Pelita Harapan, Sekolah Yayasan Tunas Muda dan lain-lain.

Pada sekolah-sekolah tersebut, guru yang mengajar tidak hanya berasal dari dalam negeri Indonesia, tetapi juga terdapat guru-guru yang berasal dari negara yang bersangkutan atau dari negara penanam modal tersebut. Guru-guru Indonesia yang akan terlibat harus memiliki standar yang mereka tetapkan, misalnya, penguasaan bahasa Inggris menjadi syarat utama, selain

kemampuan mengajar dan penguasaan materi yang baik. Tes-tes penyaringan dilakukan secara ketat dan berjenjang. Untuk itu, siapa yang berhasil lulus dan akhirnya dapat mengajar ditempat tersebut tentu saja akan mendapatkan honorarium dengan standar internasional.

Dibidang pendidikan tinggi, beberapa lembaga pendidikan tinggi swasta di Indonesia berusaha bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar negeri. Hal ini berupa pertukaran atau penerimaan mahasiswa asing. Pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri, bahkan beberapa diantaranya melakukan program pembelajaran 50 persen di dalam negeri dan 50 persen dinegara yang diajak kerjasama. Selain itu, ada pula beberapa diantara lembaga pendidikan tinggi asing tersebut membuka cabang di Indonesia.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi ini tampaknya belum mengarah pada suatu sistem yang mantap dan profesional. Satu sisi upaya untuk menjadi tantangan sebagai sebuah keniscayaan, disisi lainnya hal itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk mematikan pendidikan tinggi swasta atau negeri tertentu yang ada di Indonesia. Sering kali sikap kebijakan dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia ini cenderung tambal sulam. Suatu kebijakan sengaja dikeluarkan kemudian akan dilakukan perubahan setelah mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan.

Pada bagian tertentu, pemerintah kadang-kadang mengambil kebijakan untuk tidak mengambil kebijakan misalnya masalah pembukaan cabang perguruan tinggi luar negeri di Indonesia. Pemerintah cenderung dian dan tidak mengambil kebijakan. Sering jika suatu hal yang ada di masyarakat tidak membuat masyarakat resah atau tidak mengundang permasalahan didalam masyarakat itu sendiri, pemerintah lalu mengambil kebijakan untuk tidak mengambil kebijakan dengan kata lain membiarkan hal itu berlangsung sebagaimana adanya.

Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi

Dilihat dari sektor demografi, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Hal ini merupakan satu kekuatan yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lain. Di samping itu, jumlah perguruan tinggi yang cukup besar di negara ini, dapat pula menjadi nilai atau posisi tawar yang baik, terutama beberapa diantaranya dapat dikatakan memiliki peringkat yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan universitas atau perguruan tinggi di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Di tambah lagi, di beberapa universitas tersebut telah terjalin kerja sama yang baik dengan beberapa negara Amerika, Inggris, atau Australia, yang cukup dikenal sebagai negara yang terbaik dan memiliki pengalaman yang panjang dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Krisis Multi Dimensi

Krisis multidimensi yang melanda dunia saat ini beberapa tahun belakangan ini membuat kondisi perekonomian negara di kawasan tersebut belum mampu bangkit kembali terutama negara Indonesia. Sampai detik ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar antara bilangan 0 sampai 3 persen. Tingkat pertumbuhan ulang beberapa proyek besar yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada dunia pendidikan. Menjadi terbengkalai dan terhambat.

Beberapa negara Asean yang telah lebih dulu berhasil lepas dari krisis, akhirnya mampu meningkatkan jumlah sarjananya yang secara persentase lebih besar dibandingkan dengan negara Indonesia. Sementara Indonesia saja bertahan dengan program wajib belajar 9 tahun yang tertunda penuntasannya karena krisis multidimensi tersebut.

Antara Motivasi dan Menangkap Peluang

Peluang Indonesia untuk dapat bangkit dan bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebenarnya

cukup besar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kondisi dan kecenderungan global yang disebabkan oleh majunya teknologi informatika membuat motivasi dan keinginan umum manusia untuk terus maju dan bergerak ke depan menjadi sesuatu yang besar. Disamping itu, kemajuan dan perkembangan dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang persaingannya begitu ketat.

Salah satu hal yang membuat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar akademik yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun luar negeri. Motivasi yang cukup tinggi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia bagi dirinya sendiri membuat bangsa Indonesia secara tidak langsung memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat bersaing di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, beberapa donor yang peduli pada peningkatan mutu sumber daya manusia dibidang-bidang tertentu, juga memberikan beasiswa yang cukup besar bagi orang yang memenuhi syarat yang mereka tetapkan.

Peluang ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat berarti ketika kondisi keuangan negara sedang tidak kondusif. Hanya saja, peluang ini, sebagaimana diantaranya tidak pernah mendapat respons yang baik dari para tenaga akademik yang ada di Indonesia. Hal tersebut umumnya disebabkan kemampuan penguasaan bahasa asing terutama Inggris. Para tenaga akademik tersebut tidak memenuhi syarat. Kesalahan ini sepenuhnya ada pada Pemerintah Indonesia yang tidak mempersiapkan sebelumnya tenaga akademik ini dalam menyambut berbagai peluang tersebut.

Memerangi kebodohan dan Stabilitas Ekonomi

Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah saat ini ialah menjadikan negara besar dalam jumlah penduduk ini betul-betul besar dalam mutu sumber daya manusianya. Dengan demikian, tantangan terbesar bangsa ini ialah bagaimana

mengalahkan kebodohan yang sementara ini sedang melanda sebagian rakyatnya.

Meningkatkan mutu SDM lewat pendidikan menjadi sesuatu yang bersifat keniscayaan. Bangsa ini mau tidak mau harus melakukan perbaikan dan pembaruan di segala sektor yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Upaya pemerintah yang menaikkan anggaran belanja bidang pendidikan sebesar 20% tidak banyak berpengaruh.

Tantangan lain yang perlu dicermati pemerintah saat ini adalah, adalah yang berhubungan dengan era perdagangan bebas atau kecenderungan global umumnya, yaitu bagaimana meningkatkan atau mengembalikan posisi perekonomian yang lebih kokoh. Dalam menghadapi era persaingan bebas ini tantangan yang perlu dicermati Pemerintah Indonesia ialah berusaha mempertahankan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkelanjutan.

Sejalan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah semua kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintahan daerah, kecuali bidang-bidang tertentu. Termasuk diantaranya bidang peningkatan mutu dan pemberdayaan SDM di setiap daerah masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Upaya untuk menarik investor asing atau dalam negeri untuk bersaing oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat atau daerah yaitu bagaimana membagi wewenang ini agar tidak menjadi tumpang tindih atau bahkan menjadi sumber permasalahan atau konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Mutu Sumber Daya Manusia

Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selama ini tidak didasari oleh kepentingan rakyat semata, banyak terkandung unsur-unsur hegemoni didalamnya. Sering kali dikatakan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang

menjadi alat bagi pemerintah selama ini untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi belum mengarah pada suatu sistem yang mantap dan profesional. Kebijakan dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia cenderung bersifat tambal sulam. Suatu kebijakan yang dikeluarkan akan diubah setelah mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Sementara itu, pemerintah kadang-kadang mengambil kebijakan yang dikeluarkan akan diubah setelah mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan.

Peringkat sumber daya manusia Indonesia berada jauh dibawah negara-negara ASEAN yaitu hanya 102. hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bangsa ini untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya masih kurang. Perlu diminta komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang tersebut.

Kesimpulan

Era globalisasi merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia ini sudah semakin mengecil. Kita tidak akan lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau keadaan yang buruk dari suatu negara.

Dalam konteks informatisasi, dunia ini sudah menjadi satu, tidak ada lagi kotak-kotak yang membatasi wilayah satu dengan yang lainnya. Istilah lainnya yaitu dunia adalah satu tempat yang tunggal tanpa batas. Globalisasi ini memungkinkan untuk menjadi sebuah proses interaktif yang mengembangkan suatu kebudayaan dunia yang sama sehingga akan memunculkan suatu kebudayaan atau peradaban universal.

Rakyat indonesia, khususnya para pelaku bisnis belum memahami konsep perdagangan bebas. format pasar bebas maupun kebijakan pemerintah tentang itu pun belum pernah disosialisasikan secara optimal bagi pelaku bisnis.

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan tinggi, belum mengarah pada suatu sistem yang mantap dan profesional.

Satu sisi upaya untuk menjawab tantangan global sebagai sebuah keniscayaan, disisi lainnya. Hal itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk mematikan pendidikan yang ada di Indonesia. Sering kali sifat kebijakan dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia ini cenderung tambal sulam.

Jumlah penduduk yang cukup besar, ditambah dengan usia perguruan tinggi yang sudah cukup lama berpengalaman serta pengalaman dalam bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri, Indonesia sudah sepatutnya menjadi tempat bagi kalangan muda ASEAN datang menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Peluang-peluang yang ada cukup besar bagi para akademisi untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi di luar negeri, tetapi sayang hal itu tidak dapat diambil. Hal itu ternyata hanya disebabkan oleh kemampuan berbahasa Inggris yang tidak memadai.

Tantangan yang ada di depan mata kita adalah bagaimana mengembalikan kemajuan yang pernah dibuat oleh pemerintah orde baru, terutama kemampuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sampai 7-8 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut peluang yang ada serta berbagai hambatan yang muncul dapat diatasi dan diambil.

Saran

Hendaknya ditetapkan kebijakan yang tegas tentang usaha pembukaan cabang bagi perguruan tinggi luar negeri di Indonesia, dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia Indonesia akan lebih baik.

Berbagai pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan diharapkan

memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Alva E. Tantowi. 2001. *Pasar Bebas dan Pendidikan Tinggi*. Media Indonesia.

Azahari, Azril. 2000. *Dampak Globalisasi di Perguruan Tinggi untuk Mengantisipasi Tahun 2020*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ke 6 No. 023, Mei 2000

Kompas, *Pendidikan Pasca Sarjana Bukan Untuk Status Sosial*, 13 Oktober 2001

Sam. M. Chan. Tuti T. Sam. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT. Rajagrafindi Persada Jakarta.

Tilaar, H. A. R. 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional : Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung Remaja Rosdakarya.

-----, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta.

*) Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK UVRI Makassar